

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang mulai muncul di tengah pandemi Covid-19 adalah peningkatan pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada bulan Februari 2020 terdapat 6,88 juta pengangguran, meningkat sekitar 60.000 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Tingkat pengangguran mencapai 4,99% dari total angkatan kerja sejumlah 137,91 juta penduduk. Pemerintah memproyeksi peningkatan tingkat pengangguran akibat pandemi bisa mencapai 5,23 juta orang.¹

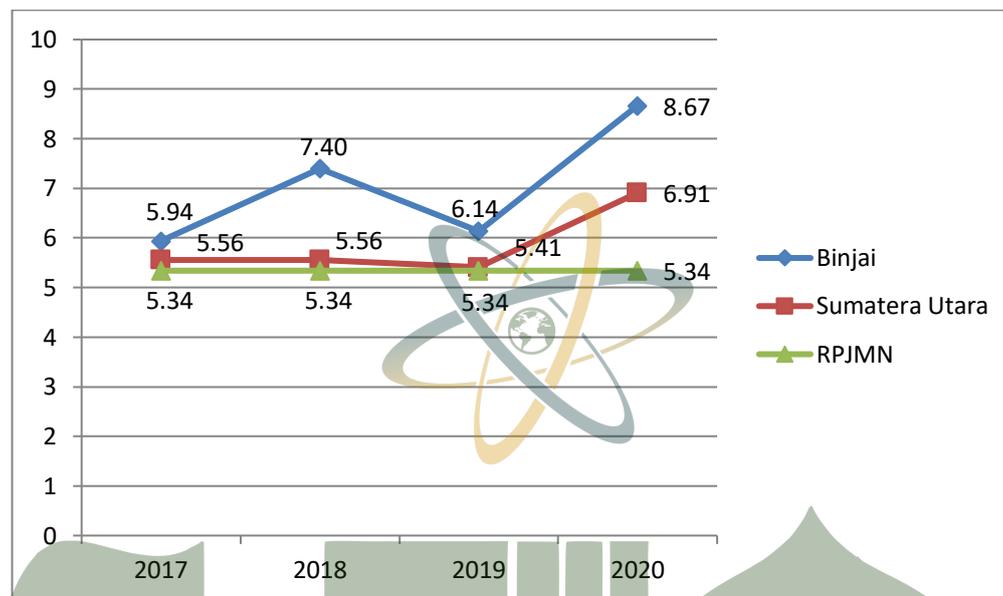
Penduduk Kota Binjai yang merupakan angkatan kerja, sebagian besar adalah laki-laki yang bekerja, sebanyak 57.128 orang. Sedangkan sebagian besar penduduk Kota Binjai yang perempuan bukan angkatan kerja mempunyai kegiatan mengurus rumah, yaitu sebanyak 28.269 orang. Nilai ini hampir sebanding dengan jumlah penduduk perempuan Kota Binjai yang bekerja, yaitu sebanyak 28.784 orang. Pada tahun 2020, terdapat 326 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Dari total pencari kerja tersebut, sebesar 53 persennya adalah perempuan.²

Dampak dari pandemi Covid-19 bisa dilihat dari Gambar 1.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai dari tahun 2019-2020 yang mengalami kenaikan sebesar 2,53%. Dari data tersebut pemerintah kota Binjai harus melakukan upaya untuk menanggulangi pengangguran yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 18 April 2021 Pukul 12.33.

² <https://binjaikota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 Pukul 09.47.

Gambar 1.1
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kota Binjai, Sumatera Utara, dan RPJMN Tahun 2017-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021

Pada gambar 1.1 kita dapat melihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Binjai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif, di mana tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan namun kembali turun di tahun 2019, begitu seterusnya hingga tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan, sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan. Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017-2020 tetap sebesar 5,34%.

Dilihat dari tingkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kota Binjai belum sampai pada target RPJMN yaitu tingkat pengangguran Kota Binjai masih berada pada 5,94%, masih tinggi jika dibandingkan target yang ingin dicapai sesuai RPJMN sebesar 5,34%. Solusi yang dapat diberikan diantaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan menstabilkan upah minimum kota.

Mengurangi tingkat pengangguran bukanlah hal yang mudah, beberapa program pemerintah yang direncanakan untuk dapat menanggulangi pengangguran belum bisa diwujudkan sesuai dengan saran, sehingga pengangguran menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Kota Binjai.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara, 2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tingkat Pengangguran Terbuka/ Unemployment Rate	
	Feb/Feb	Agt/Aug
(1)	(2)	(3)
01 Nias	1,31	3,49
02 Mandailing Natal	4,85	6,50
03 Tapanuli Selatan	2,28	4,42
04 Tapanuli Tengah	6,86	7,54
05 Tapanuli Utara	2,91	2,94
06 Toba Samosir	1,67	2,50
07 Labuhanbatu	6,10	6,05
08 Asahan	2,99	7,24
09 Simalungun	4,93	4,58
10 Dairi	-	1,75
11 Karo	0,38	1,83
12 Deli Serdang	8,17	9,50
13 Langkat	4,47	7,02
14 Nias Selatan	2,49	4,15
15 Humbang Hasundutan	0,66	0,84
16 Pakpak Bharat	0,71	1,93
17 Samosir	0,36	1,20
18 Serdang Bedagai	5,03	5,54
19 Batu Bara	7,52	6,48
20 Padang Lawas Utara	0,62	3,11
21 Padang Lawas	4,74	4,11
22 Labuhanbatu Selatan	2,42	4,90
23 Labuhanbatu Utara	6,36	6,82
24 Nias Utara	4,53	4,54
25 Nias Barat	4,41	1,71
71 Sibolga	6,19	8,00
72 Tanjungbalai	5,85	6,97
73 Pematangsiantar	7,86	11,50
74 Tebing Tinggi	5,52	9,98
75 Medan	11,39	10,74
76 Binjai	5,57	8,67
77 Padangsidimpuan	5,41	7,45
78 Gunungsitoli	6,47	5,94
Sumatera Utara	4,71	6,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai pada bulan Februari sebesar 5,57%, pada bulan Agustus sebesar 8,67%. Dampak dari Covid-19 menyebabkan pengangguran terbuka Kota Binjai meningkat sebesar 3,1%.

Tabel 1.2
Penduduk Kota Binjai Yang Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Menurut
Komponen Dampak Covid-19 terhadap Pasar Kerja/
Pengurangan Jam Kerja, Agustus 2020

Komponen Pengurangan Jam Kerja	Jumlah Penduduk Yang Bekerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengangguran karena Covid-19	2 003	1 327	3 330
Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19	589	1 184	1 773
Sementara tidak Bekerja karena Covid-19	1 591	278	1 869
Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	14 279	8 601	22 880
Jumlah	18 462	11 390	29 852

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2020

Pengangguran karena Covid-19 sebanyak 3.330 orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1.869 orang dan pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 22.880 orang. Jumlah orang yang terkena dampak Covid-19 terhadap pasar kerja maupun pengurangan jam kerja sebanyak 29.852 orang.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dimana terdiri dari Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja.³ Daerah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini terkhusus pada masyarakat di Kota Binjai.

³ <https://bps.go.id/> diakses pada tanggal 15 April 2021 Pukul 08.55.

Tabel 1.3
Penduduk Kota Binjai Menurut Komposisi Penduduk dan Jenis Kelamin
Tahun 2020

Komposisi Penduduk	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Usia Kerja	106 284	107 796	214 080
A. Angkatan Kerja	87 430	52 015	139 445
1. Bekerja	79 698	47 655	127 353
2. Pernah Bekerja	4 262	2 410	6 672
3. Tidak Pernah Bekerja	3 470	1 950	5 420
B. Bukan Angkatan Kerja	18 854	55 781	74 635
1. Sekolah	9 159	9 880	19 039
2. Mengurus Rumah Tanqqa	3 647	42 384	46 031
3. Lainnya	6 048	3 517	9 565
I. Usia Kerja	33 000	32 222	65 222
% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	91,16	91,62	91,33
% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82,26	48,25	65,14
% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,84	8,38	8,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2020

Proporsi angkatan kerja Kota Binjai sebanyak 66,86 persen pada tahun 2019 berarti ada sebanyak 66,86 persen penduduk usia kerja yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian Kota Binjai. Dari sebanyak 66,86 persen tersebut, terdapat 4,10 persen diantaranya berstatus pengangguran terbuka. Berarti 4,10 persen angkatan kerja di Kota Binjai masih belum terserap ke dalam dunia kerja, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota

Binjai pada 2019 sebesar 66,89 persen. Berarti terdapat sebanyak 66,89 persen penduduk usia kerja di Kota Binjai yang aktif secara ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2019, TPT kota Binjai sebesar 6,14 persen, berarti sebanyak 6,14 persen penduduk usia kerja masih belum terserap di pasar kerja. Dilihat dari lapangan pekerjaannya, dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2019 didapat bahwa mayoritas penduduk Kota Binjai masih bergerak pada sektor jasa. Hal ini dikarenakan Kota Binjai sebagai kota satelit yang berdekatan dengan ibukota provinsi maka lapangan pekerjaan pada sektor jasa terbuka lebar sehingga banyak penduduk Kota Binjai yang berminat bekerja pada sektor tersebut. Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor jasa di Kota Binjai adalah sebanyak 66,78 persen, dengan rincian sebanyak 56,80 persen penduduk laki-laki dan 82,60 persen.⁴

Kota Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang mulai mengalami perkembangan, perkembangan kota Binjai meliputi aspek ekonomi, fisik, sosial, dan budaya disamping dari pada Kota Medan. Pemerintah kota Binjai dalam visi dan misinya memiliki tujuan untuk memajukan kota Binjai dengan cara pengembangan kewirausahaan dengan mengajak masyarakat untuk memulai usaha-usaha yang produktif baik itu disektor Usaha Kecil Menengah (UMKM). Ada sekitar 700 pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Binjai yang terus bergerak dan melakukan inovasi sehingga membutuhkan peningkatan kualitas melalui berbagai pelatihan. Saat ini perkembangan UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) berjalan dengan baik, tercatat sebanyak kurang lebih 700 pelaku UMKM dan IKM yang ada di Binjai. UMKM terus bergerak dan berinovasi, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas. Agar para pelaku usaha mampu bersaing dengan UMKM dari daerah lain dan negara lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM yakni dengan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha. Kemudian perlunya pembinaan dari segi kualitas, pelatihan

⁴ Gusnisa Siswayu, *Profil Kemiskinan Kota Binjai 2019*, (Binjai: BPS Kota Binjai, 2020), h. 31. Diunduh di www.binjaikota.bps.go.id pada tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 16.22.

mengemas hasil produksi, sehingga para pelaku usaha siap untuk bersaing. Yang tidak kalah pentingnya pemerintah juga harus mampu menciptakan pasar, agar produk yang dihasilkan dapat terjual. Saat ini Pemerintah Kota Binjai juga telah menyiapkan satu kolaborasi untuk peningkatan UMKM dan IKM, dengan melakukan kerjasama dengan Buka Lapak, PT Bank Sumut dan Bank Indonesia.⁵

Belum adanya data berupa bantuan dana permodalan, pelatihan, maupun bantuan lainnya yang lebih spesifik untuk menanggulangi pengangguran di Kota Binjai.

Tabel 1.4
Jumlah Penerima Bantuan dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan
Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2020

Kecamatan SubDistrict	Jumlah Penerima/ Number of Aid Recipients	Anggaran Bantuan Sosial/ Social Assistance Budget
(1)	(2)	(3)
Binjai Selatan	3081	200.000
Binjai Kota	890	200.000
Binjai Timur	2567	200.000
Binjai Utara	3210	200.000
Binjai Barat	1986	200.000
Kota Binjai	11734	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵ Disampaikan Wali Kota Binjai, Bapak Muhammad Idaham, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saat membuka Pelatihan Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Produktivitas dan Daya Saing Perusahaan. Diakses di www.sumutantarnews.com pada tanggal 09 Agustus 2021 Pukul 10.13.

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Binjai Menurut Jenis Belanja
(ribu rupiah), Tahun 2019 dan 2020

Jenis Pendapatan Kind of Revenues	2019	2020
(1)	(4)	(5)
1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditure	467 282 211 715,00	489 908 311 722,00
1.1 Belanja Pegawai/Employee Expenditure	467 282 211 715,00	433 257 532 661,00
1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditure	-	-
1.3 Belanja Subsidi/Subsidy Expenditure	263 734 200,00	263 734 200,00
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditure	5 826 810 337,00	29 806 69 700,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures	-	-
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Sharing Expenditure for Provinces/Regencies/ Municipalities	-	-
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Social Aid Expenditures for Provinces/Regencies/Municipalities and Village Governments	600 598 169,00	26 580 675 161,00
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unexpected Expenditures	-	26 580 675 161,00
2. Belanja Langsung/Direct Expenditures	373 709 676 369,22	321 789 358 601,98
2.1 Belanja Pegawai/Employee Expenditure	21 297 522 964,00	4 80 94 578,00
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditure	236 077 427 722,80	189 071 82 018,87
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure	116 334 725 682,42	89 336 601 005,11
Jumlah/Total	840 991 888 084,22	811 697 670 323,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran ini terus bertambah dalam penelitian Amirul dan Hidayat diantaranya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Dalam penelitian kali ini ada tiga variabel yang diambil yaitu, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kota.

Berdasarkan teori, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya penambahan pada GDP, GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri.⁶ Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara.⁷ Berikut merupakan data PDRB Kota Binjai tahun 2017-2020.

Tabel 1.6
PDRB Kota Binjai Tahun 2017-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PE) Kota Binjai Tahun 2017-2020
2017	5.39
2018	5.46
2019	5.51
2020	-1.83

⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

⁷ N.Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2007), h.205.

Peningkatan PDRB diharapkan akan semakin mengurangi persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Binjai. Sehingga perlu adanya konsentrasi penuh dari pemerintah agar pengangguran di Kota Binjai cepat terselesaikan.

Indeks pembangunan manusia juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. BPS Kota Binjai mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi yang dianggap dapat menggambarkan standar kualitas seseorang. Tiga dimensi dasar tersebut yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.⁸ Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Dengan memperbaiki tiga dimensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap bekerja dan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Binjai. Berikut merupakan data IPM di Kota Binjai tahun 2017-2020.

Tabel 1.7
IPM Kota Binjai Tahun 2017-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai Tahun 2017-2020
2017	5.39
2018	5.46
2019	5.51
2020	-1.83

Indeks pembangunan manusia di Kota Binjai mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, sedangkan pada tahun 2020 menurun. Penurunan ini akibat dampak dari Covid-19. Pemerintah memberlakukan PPKM, aktivitas masyarakat baik di sekolah, universitas, kantor-kantor diberhentikan sementara. Pada saat wabah Covid-19 menyerang, pemerintah lebih fokus pada kesehatan masyarakat.

⁸ <https://binjaikota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 Pukul 09.47.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah Upah minimum kota (UMK). Upah minimum kota yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Binjai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Fadhilah, Alfredo, Nurcholis dan Mahroji, yakni hasilnya ada hubungan yang negatif antara kenaikan UMK dengan tingkat pengangguran. Dijelaskan bahwa dengan tingginya upah minimum yang ditetapkan maka biaya output yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan semakin besar, hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi yang mengurangi tenaga kerjanya. Sehingga semakin menaikkan tingkat pengangguran. Dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Berikut merupakan data Upah Minimum Kota Binjai tahun 2017-2020.

Tabel 1.8

Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2017-2020

Tahun	Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2017-2020
2017	2051878
2018	2230597
2019	2409714
2020	2614781

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ketiga variabel ini dipilih berdasarkan penelitian terdahulu, variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kota memiliki pengaruh signifikan dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Diharapkan upaya pemerintah Kota Binjai dapat menanggulangi pengangguran dengan berbagai program, permodalan, pembinaan, dan pelatihan. Jika penanggulangan masalah pengangguran tidak optimal, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, maka masalah pengangguran harus segera dituntaskan.

Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh.⁹ Salah bentuk campur tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui penambahan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*).

Ekonomi Syariah menjelaskan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Islam dewasa ini.¹⁰ Kebahagiaan telah menjadi tujuan utama dari semua masyarakat. Meskipun kondisi material bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, tampak kepercayaan bahwa kebahagiaan dapat dijamin apabila tujuan-tujuan materi dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran seperti pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup terhormat dan distribusi kekayaan yang merata.¹¹

Ekonomi Syariah menekankan pada aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spritual umat manusia, hal ini disebabkan umat muslim percaya bahwa kedudukan antara orang miskin dan kaya, pengangguran dan yang bekerja memiliki kedudukan sama di mata Allah untuk menjadikan khalifah di bumi sekaligus sebagai hambanya. Kebahagiaan dan ketenangan batin tidak dapat dirasakan kecuali memenuhi kebutuhan-kebutuhan

⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h. 4.

¹¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, cet. 1, (Surabaya: Gema Insani, 1999), h. 1-2.

material dan spritual, dengan kata lain, titik tekan ekonomi Syariah adalah memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara umum. Oleh karenanya Islam memiliki konsep ekonomi yang mengarahkan setiap manusia tidak berfokus pada unsur material yang menyebabkan setiap manusia menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan upaya penanggulangan pengangguran, dalam pelaksanaannya tidaklah seorangpun berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau mereka. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka al-Qur'an atau al-Hadis.¹²

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Binjai?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai?
3. Apakah pemerintah Kota Binjai menerapkan Ekonomi Syariah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai?

¹² Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15-16.

C. Batasan Istilah

1. Peran Pemerintah adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah di mana pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Dalam penelitian ini pengangguran yang dimaksud adalah masyarakat Kota Binjai.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Binjai menerapkan Ekonomi Syariah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang Ekonomi Syariah dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan UIN Medan Sumatera Utara serta para generasi yang menginginkan perubahan ke arah perbaikan dalam menerapkan Ekonomi Syariah terutama masyarakat yang menganggur.

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan referensi dalam mengembangkan wawasan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran.

2. Secara Praktisi

Secara praktisi penelitian ini menjadi masukan dan saran bagi masyarakat tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, dan menambah pengetahuan masyarakat yang ingin terjun di sektor UMKM dimulai dari permodalan, pembinaan, dan pelatihan sehingga mampu untuk bersaing, serta mengembangkan kompetensi diri masyarakat dalam mencari pekerjaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berisi kerangka peneliti yang disusun secara sistematis. Dalam penulisan agar lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagikan ke dalam beberapa “BAB” dan uraiannya, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang peran pemerintah, pengangguran, ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesa.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan defenisi operasional.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang analisis pengolahan data dan pembahasan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian.